

## PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

2019

PERBUP NOMOR 01 TAHUN 2019 16 HALAMAN

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 perlu menentukan kriteria dan aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No. 12 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda No. 02 Tahun 2009, Perda No. 18 Tahun 2016, Perda No 16 Tahun 2018, Perbup No 06 Tahun 2016, Perbup No 02 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Kewajiban pegawai, pemberian tambahan penghasilan, penganggaran, dan pengawasan .
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
2 Januari 2019

PERUBAHAN PERBUP NO 60 TAHUN 2016

2019

PERBUP NOMOR 03 TAHUN 2019, 9 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TAT KERJA SEKRETARIAT DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No. 12 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP 18 Tahun 2016, Permendagri No. 112 Tahun 2018, Perda No. 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan ini diubah yaitu Pasal 5, Pasal 42, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan ditambahkan Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C dan Pasal 67D.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
15 Februari 2019

## PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

2019

PERBUP NOMOR 04 TAHUN 2019 69 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN TATA CARA PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No. 12 Tahun 1999, UU No 6 Tahun 2014;, UU No. 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 129 Tahun 2018, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No.114 Tahun 2014, Permendagri No 1 Tahun 2016, Permendagri No.44 Tahun 2016, Permendagri No.18 Tahun 2018, Permendagri No.20 Tahun 2018,

Permendes PDTT No.16 Tahun 2018, Permenkeu No.193/PMK.07/2018,Perda No 13 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Ruang Lingkup, pengalokasian, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan sanksi.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2019

CATATAN :

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2017

2019

PEBUP NOMOR 07 TAHUN 2019 4 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PEGAWAI BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH SUKADANA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi pendayagunaan pegawai BLUD Non PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana telah diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2017. Bahwa besaran honorarium pegawai BLUD Non PNS dipandang belum layak sehingga perlu dilakukan perubahan
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Perubahan atas besaran honorarium tenaga

Kesehatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang non Kesehatan

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
- diundangkan 1 April 2019

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2019

PERBUP NOMOR 08 TAHUN 2019 16 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa salah satu sumber pendapatan desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2016, Perpres 16 Tahun 2018, Permendagri No 20 Tahun 2018, Perka LKPBJP No 13 Tahun 2013, Perda No. 05 Tahun 2003, Perda No 05 Tahun 2003, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 18 Tahun 2016, Perda No 16 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Tujuan, sumber dana dan penghitungan alokasi, prioritas penggunaan, mekanisme, penyaluran dan pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 2019

# BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS

2019

PEBUP NOMOR 09 TAHUN 2019 9 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Puskesmas;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 09 Tahun 2015, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 24 Tahun 2005, Perpres No. 32 Tahun 2014, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permenkes No 75 Tahun 2014, Permenkes No 44 Tahun 2016, Permenkes 21 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016, Perbup No. 71 Tahun 2016, Perbup No. 42 Tahun 2017, Perbup 45 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ruang Lingkup; Pemanfaatan dana pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pemanfaatan dana pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, pendapatan yang berasal dari Hibah dalam bentuk kas, pemanfaatan danan pendapatan BLUD lainnya



CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 2019

## TARIF PELAYANAN

2019

PEBUP NOMOR 10 TAHUN 2019 23 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan di Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Bupati;
- Bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas sebagai Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaannya diperlukan tarif pelayanan puskesmas
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, Permenkes No. 75 Tahun 2014, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perda No. 18 Tahun 2016, Perbup No 42 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tarif pelayanan Kesehatan; Tata Cara Pengenaan Tarif Pelayanan dan Penatausahaan; Keringanan dan Pembebasan Tarif Pelayanan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 April 2019

## TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN

2019

PEBUP NOMOR 11 TAHUN 2019 13 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dipandang sangat krusial karena berperan menjalankan fungsi pelayanan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan sambil menunggu Surat Menpan RB tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemkan Lampung Timur, maka berita acara validasi hasil evaluasi jabatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang diterbitkan oleh KemenPanRB tanggal 14 Desember 2018 dapat dijadikan dasar perhitungan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 01 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2016, PP No.23 Tahun 2017, Permen PAN&RB No. 63 Tahun 2011, Permen PAN&RB No. 39 Tahun 2013, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda No. 2 Tahun 2009, Perda No. 18 Tahun 2016, Perbup No. 02 Tahun 2018

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:  
Kewajiban Pegawai, Pemberian Tambahan  
Penghasilan Kepada Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah, Pengaangaran dan Pembayaran,

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan 29 April 2019

## SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

2019

PEBUP NOMOR 12 TAHUN 2019 9 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG SISTEM PEMBAYARAN  
NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur agar berjalan efektif efisien tertib dan transparan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu disusun peraturan yang mengatur mengenai transaksi keuangan;
- Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 910/186/SJ, maka perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur mengenai system pembayaran non tunai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:  
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 01 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No, 9 Tahun 2015, PP No 23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007 PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 65 Tahun 2010, PP No.74 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda No. 18 Tahun 2016, Perbup No 84 Tahun 2016

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:  
Asas dan Tujuan; Transaksi Non Tunai; Nomor Rekening; Pembinaan; Pengawasan; Sanksi; Lain-lain

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 April 2019.

PERUBAHAN PERBUP NO 54 TAHUN 2016

2019

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2019, 6 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:  
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No 01 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 05 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2010, PP No 02 Tahun 2012, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Kepres No 42 Tahun 2002, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permen PAN & RB No 63 Tahun 2011, Perda No 18 Tahun 2016, Perda No. 02 Tahun 2009.



- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:  
Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 54 Tahun 2016

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Mei 2019

## KARTU IDENTITAS ANAK

2019

PEBUP NOMOR 15 TAHUN 2019 10 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

- ABSTRAK : - Dalam rangka upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak maka Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas yang berlaku nasional dan terintegrasi dengan system informasi dan administrasi kependudukan kepada anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah;
- Bahwa pemberian identitas anak sebagai upaya peningkatan pendataan perlindungan dan pelayanan publik maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan menyelenggarakan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:  
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2006, PP No. 23 Tahun 2014, UU No. 09 Tahun 2015, Perpres No. 96 Tahun 2018, Permendagri No. 02 Tahun 2016, Perda No 07 Tahun 2011, Perda No. 06 Tahun 2016, Perbup No 15 Tahun 2006, Perbup No 30 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:  
Tujuan dan Sasaran; Persyaratan dan Tata Cara; Kemitraan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Mei 2019

# PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD UPTD DINAS KESEHATAN

2019

PEBUP NOMOR 17 TAHUN 2019 18 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPTD DINAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dapat berlangsung secara efektif dan efisien dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai professional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
- Dalam menerapkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Dinas yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dapat mempekerjakan pegawai BLUD Non PNS dan professional lainnya.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Permenkes No. 75 Tahun 2014, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perda No 18 Tahun 2016, Perbup No.71 Tahun 2016, Perbup No.42 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:  
Tujuan, Penerimaan Pegawai BLUD Non PNS,  
Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS,  
Pembinaan dan Penghargaan, Hak dan Kewajiban,  
Larangan dan Sanksi, Pemberhentian Pegawai  
BLUD Non PNS, Anggaran, Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 2019

## PENDELEGASIAN KEWENANGAN

2019

PEBUP NOMOR 18 TAHUN 2019 30 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kepada Camat
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:  
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 06 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No 129 Tahun 2018, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes PDT&Trans No. 16 Tahun 2018; Permenkeu No. 193/PMK.07/2018, Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2013

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:  
Pelaksanaan dan Penarikan Delegasi; Pembinaan  
dan Pengendalian;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan 3 Juni 2019

## PENETAPAN DESA WISATA

2019

PEBUP NOMOR 19 TAHUN 2019 7 HALAMAN

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan pembanguna pariwisata berkelanjutan maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi padapeningkatan kesejahteraan masyarakat pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:  
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2007, UU No 10 Tahun 2009, UU No 06 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No 30 Tahun 2006, Perda No 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:  
Tujuan, Sasaran dan Fungsi; Tugas dan Tanggung Jawab; Hak dan Kewajiban; Pemanfaatan dan Pengembangan; Kawasan Desa Wisata; Pengelolaan dan Pengawasan;
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juni 2019



## PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 52 TAHUN 2018

2019

PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2019 30 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 160 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1985, UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No 20 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UUPP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Permendagri No 113 Tahun 2014, Perka LKPP No 13 Tahun 2013, Perda No 5 Tahun 2003, Perda No 24 Tahun 2007, Perbup No 12 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Ketentuan Pasal 3 diubah dan tercantum dalam Lampiran
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juni 2019

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019 50 HALAMAN

## PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Rncanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 2 Tahun 2015, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No. 31 Tahun 2019, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Perda No 10 Tahun 2010, Perda No 15 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Rencana kerja pemerintah daerah
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2019

## PEDOMAN PENYUSUNAN APBD

2019

PERBUP NO 24 TAHUN 2019 4 HALAMAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 24 Tahun 2004, PP No 23 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 18 Tahun 2016, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permenkeu No 45/PMK.05/2007, Permendagri No 33 Tahun 2019, Perda No 02 Tahun 02 Tahun 2009, Perda No 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:  
Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018

## PERUBAHAN PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2018

2019

PERBUP NO 25 TAHUN 2019 5 HALAMAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PESERTA UMRAH DAN WISATA ROHANI YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi pejabat dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur perlu diselenggarakan ibadah umrah dan wisata rohani.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 14 Tahun 2008, PermenAgama No 8 Tahun 2018, Perda No 18 Tahun 2016, Perda No 16 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Perubahan dalam Pasal 6 dan Pasal 7
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019

## PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

2019

PERBUP NO 26 TAHUN 2019 7 HALAMAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1985, UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 24 Tahun 2004, PP No 23 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 18 Tahun 2016, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permenkeu No 45/PMK.05/2007, Permendagri No 33 Tahun 2019, Perda No 02 Tahun 02 Tahun 2009, Perda No 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019

## PERUBAHAN PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2019

2019

PERBUP NO 27 TAHUN 2019 5 HALAMAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 22 Tahun 2018, Pemendagri No 38 Tahun 2018, Perda PropNo 06 Tahun 2014, Perda No 10 Tahun 2010, Perda No 15 Tahun 2016, Perda No 12 Tahun 2018, Perbup No 28 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan KUA, PPAS, dan perubahan RAPBD Tahun 2019

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019

PERUBAHAN PEBUP NO 43 TAHUN 2018

2019

PERBUP NO 28 TAHUN 2019 8 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK : - Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta belum terakomodirnya beberapa layanan perizinan dan non perizinan maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur tentang pen delegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2017, PP No 96 Tahun 2012, PP No 24 Tahun 2018, PP No 107 Tahun 2015, Perpres No 97 Tahun 2014, Perpres No 91 Tahun 2017, Pemnen kelautan Perikanan PER12/MEN/2007, Permen Pariwisata No 18 Tahun 2016, Permenhub No 75 Tahun 2017, Permendagri No 138 Tahun 2017, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 18 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Lampiran Peraturan Bupati diubah

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019



## PENJABARAN PERUBAHAN APBD

2019

PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2019 93 HALAMAN

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Perda Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1985, UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 20 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 24 Tahun 2004, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 5 Tahun 2009, PP No 71 Tahun 2010, PP No 18 Tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, PP No 56 Tahun 2018, PP No 56 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 33 Tahun 2019, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 03 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Ringkasan penjabaran perubahan APBD

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019

## PENEMPATAN UANG DAERAH

2019

PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2019 7 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH/DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 328 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dalam rangka manajemen kas pemerintah daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan likuiditas pelayanan publik
- Berdasarkan ketentuan Pasal 116 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka Panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/untuk manfaat lainnya
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU Nomor 7 Tahun 1992, UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 01 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 79 Tahun 2005, PP No 39 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda No 02 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Penempatan Perencanaan Posisi Kas Investasi Jangka

Pendek Dalam Bentuk Deposito, Tata cara penunjukan Bank Umum dan penunjukan rekening deposito, pencairan deposito, pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019

## PENERIMAAN PESERTA DIDIK

2019

PERBUP NOMOR 33 TAHUN 2019 16 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PAUD, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 20 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, PP No 19 Tahun 2005, PP No 17 Tahun 2010, PP No 48 Tahun 2008, PP No 12 Tahun 2017, Perpres No 14 Tahun 2015, Permen Dikbud No 22 Tahun 2016, Permen Dikbud No 11 Tahun 2018, Perda No 18 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Tata Cara PPDB, perpindahan peserta didik, pelaporan dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019

## KELAS JABATAN

2019

PERBUP NOMOR 34 TAHUN 2019 36 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Permen PAN&RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk menetapkan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 2014, PP No 11 Tahun 2017, Perpres No 81 Tahun 2010, Permen PAN&RB No 20 Tahun 2010, Permen PAN&RB No 39 Tahun 2013, Permen PAN&RB No 41 Tahun 2018, Perda No 18 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Kelas jabatan, perubahan kelas jabatan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2019

## SOP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

2019

PERBUP NOMOR 35 TAHUN 2019 36 HALAMAN

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL P PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- ABSTRAK** : - Untuk terselenggaranya dan meningkatkan pelayanan publik khususnya di bidang perizinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan perlu adanya jaminan kepastian hukum tentang persyaratan, mekanisme dan prosedur, biaya, waktu serta produk pelayanan yang menjadi pedoman baik bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan maupun bagi aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No 2 Tahun 2017, PP No 96 Tahun 2012, PP 107 Tahun 2015, PP No 24 Tahun 2018, Perpres No 97 Tahun 2014, Perpres No 91 Tahun 2017, Permendagri No 138 Tahun 2017, Perbup No 43 Tahun 2018, Perbup No 28 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Maksud dan tujuan, ruang lingkup standar operasional prosedur, bagan atau alur proses izin, perjanjian kerja sama, mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengaduan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2019

## PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

2019

PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2019 44 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu dilakukan pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 43 Tahun 2009, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 61 Tahun 2010, PP No 28 Tahun 2012, Perka Arsip No 09 Tahun 2018, Perda No 18 Tahun 2016, Perbup No 81 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Pedoman pengelolaan arsip dinamis, pedoman pengelolaan arsip vital, pedoman penyusutan arsip, pembiayaan
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 2019



## PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

2019

PERBUP NOMOR 37 TAHUN 2019 20 HALAMAN

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT LAMPUNG TIMUR DI RSUD SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan pelayanan Kesehatan rujukan kepada masyarakat agar masyarakat Lampung Timur memperoleh perlindungan dan manfaat pemeliharaan Kesehatan diperlukan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur
- Bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur perlu disusun pedoman pelaksanaan
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 40 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 74 Tahun 2012, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2007, Perpres No 72 Tahun 2012, Pepres No 82 Tahun 2018, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permenkes No 71 Tahun 2013, Perda No 10 Tahun 2010, Perda No 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggara pelayanan Kesehatan, pelayanan Kesehatan bagi peserta, alokasi dan pemanfaatan dana, system

pembayaran pelayanan Kesehatan, kendali mutu dan kendali biaya, pelaporan,.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019

## PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

2019

PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2019 ; 6 HALAMAN

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**ABSTRAK** : - Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat luas terhadap program-program pembangunan, kegiatan sosial masyarakat insiden bencana alam dan hal-hal yang dipandang perlu untuk di ekspos dalam rangka percepatan pembangunan baik fisik dan non fisik dari 24 Kecamatan se Kabupaten Lampung Timur maka diperlukan pengelolaan informasi public melalui media sosial

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 14 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2008, PP No 52 Tahun 2000, PP No 79 Tahun 2005, Perda No 18 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, mekanisme dan susunan tim pengelolaan informasi public melalui media sosial, pembinaan dan pengawasan, pendanaan

**CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019

## PERUBAHAN PERBUB NOMOR 04 TAHUN 2019

2019

PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2019, 8 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN TATA CARA PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, penghasilan tetap Kepala desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya mengalami perubahan
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 06 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Perpres No 129 Tahun 2018, Permendagri No 01 Tahun 2014, Permendagri No 111 Tahun 2014, Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendagri No 1 Tahun 2016, Permendagri No 44 Tahun 2016, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Permendagri No 20 Tahun 2018, Permendes No 16 Tahun 2018, Permenkeu No 193/PMK.07/2018, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 13 Tahun 2016, Perda No 16 Tahun 2018, Perbup No 04 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Perubahan Pasal 8, ditambahkan Pasal 18.A, Pasal 20,  
Pasal 26

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018

## RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

2019

PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2019, 11 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

ABSTRAK : - Bahwa untuk merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lampung Timur sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun maka perlu ditetapkan Rencana Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 65 Tahun 2005, PP No 18 Tahun 2016, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 65 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No 64 Tahun 2013, Permendagri No 54 Tahun 2010, Permendagri No 17 Tahun 2009, Perda No 04 Tahun 2009, Perda No 15 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Rencana strategis Sekretaris Dewan Pengurus Korpri

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018

## RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

2019

PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2019 ; 177 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGRO MINAPOLITAN SUKAKARYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019-2023

ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk Menyusun rencana pembangunan Kawasan perdesaan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Permendes No 5 Tahun 2016, Kepmen Kelautan Perikanan No KEP/32/MEN/2010, Perda Prop No 6 Tahun 2007, Perda Prov No 1 Tahun 2010, Perda Provinsi Lampung No 06 Tahun 2014, Perda No 10 Tahun 2010, Perda No 15 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Prinsip, tujuan dan sasaran, penyelenggaraan pembangunan Kawasan perdesaan, kelembagaan dan pendampingan, pendanaan, pembinaan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
2019

PERBUP NOMOR 42 TAHUN 2019, 9 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL)  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 - 2022

- ABSTRAK : - Bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaan untuk mencapai universal access sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
- Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals), khususnya kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran nasional perlu disusun Rencana Aksi Daerah di bidang penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 16 Tahun 2005, PP No 6 Tahun 2008, PP No 122 Tahun 2015, Perpres No 59 Tahun 2017, Permen PU No 18/PRT/M/2007, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permen PU No 29/PRT/M/2018, Perda No 15 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Peran, fungsi dan kedudukan RAD AMPL Kabupaten



Lampung Timur Tahun 2018-2022, pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Lampung Timur 2018-2022; pemantauan dan evaluasi RAD AMPL Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018-2022

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
2019

PERBUP NOMOR 43 TAHUN 2019, 13 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN SUMBER DANA ALOKASI  
KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Timur salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak melalui program jaminan persalinan yang meliputi perawatan ibu hamil resiko, pertolongan persalinan, perawatan ibu nifas beresiko dan perawatan neonates beresiko bagi keluarga miskin yang tidak mempunyai jaminan pembiayaan apapun
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permenkes No 53 Tahun 2014, Permenkes No 97 Tahun 2014, Permenkes No 03 Tahun 2019, Perda No 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Tujuan, kebijakan operasional, sasaran pelayanan dan ruang lingkup; Pemanfaatan dana, pengelolaan dana dan standar biaya; Indikator keberhasilan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019

## UNIT KELILING SAHABAT DESA

2019

PERBUP NOMOR 44 TAHUN 2019, 7 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS UNIT KELILING SAHABAT DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mengetahui efektivitas tingkat perkembangan desa, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa melalui pembangunan dan peningkatan sumberdaya manusia;
- Bahwa dalam strategi peningkatan terhadap status desa tertinggal menuju desa maju dan mandiri dilaksanakan melalui unit keliling sahabat desa
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Permendagri No 1 Tahun 2014, Permendagri No 111 Tahun 2014, Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendagri No 81 Tahun 2015, Permendes No 2 Tahun 2016, Permendagri No 44 Tahun 2016, Permendagri No 20 Tahun 2018, Permenkeu No 193/PMK.07/2018 Tahun 2018, Permendes No 2 Tahun 2016, Perda No 13 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Tujuan, Manfaat dan Sasaran; Ruang Lingkup; Pelaksana dan Tugas; Tahapan dan Pelaksanaan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019

## PERPUSTAKAAN DESA

2019

PERBUP NOMOR 45 TAHUN 2019, 6 HALAMAN

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERPUSTAKAAN DESA

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 4 Tahun 1990, UU No 12 Tahun 1999, UU No 20 Tahun 2003, UU No 33 Tahun 2004, UU No 43 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 24 Tahun 2014, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendes No 4 Tahun 2017, Keprmendagri No 3 Tahun 2001, Peraturan Kepala Perpus No 15 Tahun 2014, Peraturan Kepala Perpus No 16 Tahun 2017, Perda No 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Tujuan, Pembentukan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan; Sarana dan Prasarana; Layanan dan Perawatan; Pembinaan; Pembiayaan.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019

PERUBAHAN PERBUP NO 37 TAHUN 2016  
2019

PERBUP NOMOR 46 TAHUN 2019, 6 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa besaran tarif retribusi dan biaya operasional pengendalian Menara telekomunikasi di Kabuapten Lampung Timur yang diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur tentang perubahan Atas peraturan bupati lampung timur nomor 37 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penataan, Pembangunan, Pengoperasian Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Lampung Timur perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil saat ini
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 36 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 52 Tahun 2000, PP No 53 Tahun 2005, PP No 12 Tahun 2019, Permenkominfo No 02/PER/M.KCMINFO/03/2008, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 23 Tahun 2011, Perbup No 37 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Ketentuan dalam Pasal 4 mengenai besaran tarif retribusi diubah

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019

## PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

2019

PERBUP NOMOR 48 TAHUN 2019, 26 HALAMAN

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pemanfaatan, mengoptimalkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata Kelola pemerintahan yang baik maka perlu adanya pengaturan tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 Tahun 2014, PP No 38 Tahun 2016, Permendagri No 5 Tahun 1997, Permendagri No 7 Tahun 2006, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 19 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Maksud dan tujuan; Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah; Tata Cara Pelaksanaan Sewa; Pembiayaan

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2019



## PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

2019

PERBUP NOMOR 49 TAHUN 2019, 25 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DARI DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa barang milik daerah yang diserahkan kepada Bupati Lampung Timur, dialihkan status penggunaannya, dipindahtangankan, ditetapkan menjadi milik pihak lain, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya diserahkan kepada pihak lain karena ketentuan perundang-undangan dimusnahkan atau sebab lainnya harus dihapuskan dari daftar barang milik pengguna, daftar milik pengelola atau daftar barang milik daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 5 Tahun 1997, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda No 19 Tahun 2016, Perda No 08 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Mekanisme Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2019

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI KESBANGPOL

2019

PERBUP NOMOR 50 TAHUN 2019, 13 HALAMAN

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, , UU No 23 Tahun 2014, Perda No 23 Tahun 2007, Perda No 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi;
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2019

## SISTEM INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT (SIP-MAS)

2019

PERBUP NOMOR 52 TAHUN 2019, 13 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT (SIP-MAS)

- ABSTRAK : - Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan public diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2009, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP 96 Tahun 2012, PP No 12 Tahun 2017, PP No 18 Tahun 2016, Perpres No 76 Tahun 2013, Perpres No 76 Tahun 2013, Perpres No 87 Tahun 2014, Permenpan No Per/05/M.PAN/4/2009, Permenpan No 3 Tahun 2015, Perda No 18 Tahun 2016, Perda No 04 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Maksud dan Tujuan; Asas dan Prinsip Penanganan Pengaduan Masyarakat; Ruang Lingkup; Bentuk Pengaduan Masyarakat; Kelembagaan
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018

## TUPOKSI DINAS PERIKANAN

2019

PERBUP NOMOR 53 TAHUN 2019, 21 HALAMAN

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

- ABSTRAK** : - Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda No 4 Tahun 2019
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019

TUPOKSI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
2019

PERBUP NOMOR 55 TAHUN 2019, 15 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda No 4 Tahun 2019
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019

## TUPOKSI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

2019

PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2019, 15 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2007, PP No 21 Tahun 2008, PP No 22 Tahun 2008, Perpres No 8 Tahun 2008, Permendagri No 27 Tahun 2007, Permendagri No 46 Tahun 2008, Per Kepala BNPB No 1 Tahun 2008, Perda No 6 Tahun 2019
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019

## TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT

2019

PERBUP NOMOR 57 TAHUN 2019, 36 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Perbup Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur dipandang perlu ditinjau Kembali
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016 Permendagri No 56 Tahun 2019, Perda No 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Kedudukan dan Susunan Organisasi
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019

## TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2019

PERBUP NOMOR 58 TAHUN 2019, 18 HALAMAN

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016; Perda No 04 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Kedudukan dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019



## PERUBAHAN PERBUP NOMOR 76 TAHUN 2016

2019

PERBUP NOMOR 59 TAHUN 2019, 6 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 76 TAHUN 2016 KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

-  
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016; Perda No 04 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Ketentuan Pasal 5 , Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 diubah

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019

# TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2019

PERBUP NOMOR 60 TAHUN 2019, 15 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016; Perda No 04 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Kedudukan dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019

## TUGAS FUNGSI TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2019

PERBUP NOMOR 61 TAHUN 2019, 22 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016; Perda No 04 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Kedudukan dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019

## TUGAS FUNGSI TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2019

PERBUP NOMOR 62 TAHUN 2019, 18 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016; Perda No 04 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Kedudukan dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019

# SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2019

PERBUP NOMOR 63 TAHUN 2019, 15 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016; Perda No 04 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Kedudukan dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Tata Kerja.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019

## PENJABARAN APBD

2019

PERBUP NOMOR 64 TAHUN 2019, 6 HALAMAN

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 5 Tahun 2009, PP No 71 Tahun 2010, PP 18 Tahun 2016, Permendagri No 13 Tahun 2006; Permedagri No 62 Tahun 2017, Permendagri Nomor 33 Tahun 2019, Perda No 02 Tahun 2009, Perda No 18 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

**CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019

## PERUBAHAN KEDUA PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2019

2019

PERBUP NOMOR 64.A TAHUN 2019, 78 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 164 perubahan perkada tentang penjabaran APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 5 Tahun 2009, PP 71 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011, Permendagri No 52 Tahun 2012, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri 133 Tahun 2017, Permendagri No 38 Tahun 2018, Permendagri No 79 Tahun 2018, Perda No 02 Tahun 2009, Perda Nomor 03 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Perubahan APBD

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019



## PAKAIAN DINAS KHUSUS

2019

PERBUP NOMOR 65 TAHUN 2019, 7 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan citra aparatur Pemerintah Kabupaten khususnya dibidang pelayanan publik dan sebagai upaya untuk menciptakan suasana bersahabat bagi masyarakat dan pelaku usaha
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2009, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 97 Tahun 2014, Permendagri No 138 Tahun 2017, Perda No 18 Tahun 2016, Perbup No 72 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Maksud dan Tujuan ; Ruang Lingkup; Jenis dan Model Pakaian Dinas; Penggunaan Pakaian Dinas Khusus
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019

PERUBAHAN PERBUP NOMOR 64 TAHUN 2016

2019

PERBUP NOMOR 66 TAHUN 2019, 5 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 64 TAHUN 2016 KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu ditata kembali
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda No 18 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Ketentuan Pasal 5 , Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 diubah
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019

## IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

2019

PERBUP NOMOR 67 TAHUN 2019, 7 HALAMAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - Bahwa implementasi Pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi, oleh karena itu diperlukan implementasi Pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No 12 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 30 Tahun 2002, UU No 20 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, PP No 19 Tahun 2005, PP No 47 Tahun 2008, Pp No 48 Tahun 2008, PP No 17 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2019, Perda No 18 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :  
Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi, Pelaksanaan Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi, Kerjasama, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019